



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	7
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hingga Triwulan II	9
BAB III	21
RENCANA KERA DAN PENDANAAN	21
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	21
KABUPATEN TABALONG	21
BAB IV	30
PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025	9
Table 2.2 Rekapitulafi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 (Triwulan II)	12
Tabel 3.1 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tabalong	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun Renja Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 disusun dengan beedoman pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban, serta penegakan kebijakan dan peraturan

daerah terjamin dan jelas aturan lainnya, karena adanya payung hukum yang mendasarinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tahun Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Permendari Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang JPD dan dan JMD, serta Tata Cara Perubahan PJD, JMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 – 2034.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun 2021
30. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabalong.
31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2025
32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong;

2. Keadaan yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan target kinerja dan pagu kegiatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk penyempurnaan Rencana Kerja untuk menyesuaikan perubahan target terhadap program dan kegiatan dan menyesuaikan perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong;
2. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD Hingga Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hingga Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 2.1 Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kinerja		Realisasi		%
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	-	23.743.582.434	5.453.702.650	
1	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		91.138.568	20.985.400	
1.1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	24.304.819	9.767.000	
1.2	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.194.018	2.415.000	
1.3	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	6.989.214	-	
1.4	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.684.680	1.620.000	
1.5	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	3.732.630	-	
1.6	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	7 Laporan	15.960.178	7.183.400	
1.7	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	2.804.484	-	
1.8	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	17.615.740	-	
1.9	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	-	13.852.805	-	
2	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	48%	12.480.673.303	3.582.891.773	
2.1	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	78 Orang	12.472.515.000	3.582.891.773	
2.2	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.546.483	-	
2.3	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8 Laporan	6.611.820	-	
3	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		-	-	
3.1	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
3.2	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2 Laporan	-	-	

4	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		609.690.240	51.901.466	
4.1	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	0 Paket	494.358.240	-	
4.2	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	12 Orang	115.332.000	51.901.466	
5	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		4.043.032.418	338.123.191	
5.1	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	14 Paket	3.140.773.988	66.608.718	
5.2	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	312.651.738	49.074.804	
5.3	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	103.389.692	26.350.000	
5.4	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	105.210.000	1.770.000	
5.5	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141 Laporan	72 Laporan	381.007.000	194.319.669	
6	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		4.011.528.931	1.143.675.553	
6.1	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	262.200.000	35.733.083	
6.2	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	9 Laporan	3.749.328.931	1.107.942.470	
7	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%		2.498.948.422	316.125.267	
7.1	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	23 Unit	939.070.000	219.815.367	
7.2	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	30 Unit	55.000.000	10.568.000	
7.3	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.504.878.422	85.741.900	
II	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%		2.05.835.250	887.412.706	
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%				
1	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksana Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%		2.025.835.165	870.967.821	
1.1	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	4 Dokumen	246.088.240	11.328.941	
1.2	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	1.136.647.425	643.742.000	
1.3	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Dokumen	28 Dokumen	120.761.000	51.526.880	
1.4	1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	51 laporan	19 laporan	522.338.500	164.100.000	
2	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%		472.311.693	5.270.000	
2.1	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	-	78.780.000	-	
2.2	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	2 unit	-	150.490.693	3.220.000	
2.3	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	-	22.740.000	-	
2.4	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 Laporan	-	28.000.000	-	
2.5	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 Laporan	-	55.600.000	-	
2.6	1.05.02.2.01.0011	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan	12 Laporan	-	95.573.000	-	

		Bupati/walikota	Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota					
2.7	1.05.02.2.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	6 Laporan	41.128.000	2.050.000	
3	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%		95.929.392	11.444.885	
3.1	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	80.292.000	11.444.885	
3.2	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4 Laporan	-	15.637.392	-	
III	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	100%	13%	9.503.656.335	2.879.697.000	
			Teenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran	6 Unit	6 Unit			
1	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	13%	9.503.656.335	2.879.697.000	
1.1	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	30 Dokumen	40 Dokumen	655.809.176	26.025.000	
1.2	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	6 Unit	8.847.847.159	2.853.672.000	

Table 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 (Triwulan II)

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

TRIWULAN II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)			
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			-		9.852.581.385		23.743.582.434		2.416.569.639		3.037.133.011		-		-		5.453.702.650		22,97%		15.306.284.035		0,00%		
		Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		-		74.180.328	100	91.138.568	-	5.800.000	-	15.185.400		-		-	-	20.985.400	0,00%	23,03%	0,00	95.165.728	0,0 0 %	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) (Dokumen)		-			3	24.304.819	1	5.800.000	-	3.967.000					1	9.767.000	33,33%	40,19%	1,00	9.767.000	0,0 0 %	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)		-			1	4.194.018	-	-	1	2.415.000					1	2.415.000	100,00%	57,58%	1,00	2.415.000	0,0 0 %	0,00%		

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		-			1	6.989.214	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		-			1	1.684.680	1	-	-	1.620.000			1	1.620.000	100,00%	96,16%	1,00	1.620.000	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		-			2	3.732.630	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		-	11,00	74.180.328	12	15.960.178	4	-	3	7.183.400			7	7.183.400	58,33%	45,01%	18,00	81.363.728	0,00%	0,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		-			1	2.804.484	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		-			1	17.615.740	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		-			1	13.852.805	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (persen)		-	0,00	6.966.853.058	100	12.480.673.303	-	1.508.031.341	-	2.074.860.432			-	-	0,00%	28,71%	0,00	10.549.744.831	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	38,00	6.966.853.058	40	12.472.515.000	36	1.508.031.341	78	2.074.860.432			114	3.582.891.773	100,00%	28,73%	152,00	10.549.744.831	0,00%	0,00%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-		1	1.546.483	1	-	-	-			1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-		18	6.611.820	3	-	-	-			3	-	16,67%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)	-	-	100	8.570.552	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-		2	4.153.728	1	-	1	-			2	-	100,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-		4	4.416.824	1	-	1	-			2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	-	0,00	120.673.133	100	609.690.240	-	31.531.000	-	20.370.466	-	-	51.901.466	0,00%	8,51%	0,00	172.574.599	0,00%	0,00%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1,00	1.550.000	80	494.358.240	-	-	-	-		-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.550.000	0,00%	0,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	8,00	119.123.133	20	115.332.000	4	31.531.000	4	20.370.466		8	51.901.466	40,00%	45,00%	16,00	171.024.599	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)	-	0,00	868.960.194	100	4.043.032.418	-	113.575.486	-	224.547.705	-	-	338.123.191	0,00%	8,36%	0,00	1.207.083.385	0,00%	0,00%

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	10,00	142.046.800	22	3.140.773.988	4	4.520.000	-	62.088.718				4	66.608.718	18,18%	2,12%	14,00	208.655.518	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	3,00	64.899.750	7	312.651.738	2	1.600.000	2	47.474.804				4	49.074.804	57,14%	15,70%	7,00	113.974.554	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	4,00	44.295.000	3	103.389.692	2	1.150.000	1	25.200.000				3	26.350.000	100,00%	25,49%	7,00	70.645.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	2,00	4.510.000	2	105.210.000	1	1.290.000	1	480.000				2	1.770.000	100,00%	1,68%	4,00	6.280.000	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	29,00	613.208.644	141	381.007.000	26	105.015.486	20	89.304.183				46	194.319.669	32,62%	51,00%	75,00	807.528.313	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	-	0,00	761.060.632	100	4.011.528.931	-	644.145.419	-	499.530.134		-	-	-	1.143.675.553	0,00%	28,51%	0,00	1.904.736.185	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	13,00	73.799.706	12	262.200.000	3	15.261.721	3	20.471.362				6	35.733.083	50,00%	13,63%	19,00	109.532.789	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	112,00	687.260.926	12	3.749.328.931	3	628.883.698	-	479.058.772				3	1.107.942.470	25,00%	29,55%	115,00	1.795.203.396	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	-	0,00	1.060.854.040	100	2.498.948.422	-	113.486.393	-	202.638.874		-	-	-	316.125.267	0,00%	12,65%	0,00	1.376.979.307	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	22,00	442.518.357	28	939.070.000	21	99.382.393	2	120.432.974				23	219.815.367	82,14%	23,41%	45,00	662.333.724	0,00%	0,00%

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	32,00	27.080.000	57	55.000.000	10	4.750.000	10	5.818.000				20	10.568.000	35,09%	19,21%	52,00	37.648.000	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	1,00	591.255.683	2	1.504.878.422	1	9.354.000	-	76.387.900				1	85.741.900	50,00%	5,70%	2,00	676.997.583	0,00%	0,00%
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							68,42%	22,97%					
											Predikat Kinerja							Sedang	Sangat Rendah					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persen)	85,00	0,00		75		-		-						-		0,00%		0,00			
			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (Persen)	85,00	0,00		75		-		-						-		0,00%		0,00			
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persen)	85,00	0,00		75		-		-						-		0,00%		0,00			
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persen)	85,00	0,00	18.459.399.153	4.382.822.002	75	2.594.076.250		417.019.885		470.392.821		-		-		887.412.706	34,21%	0,00	5.270.234.708	28,55%	
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%) ()	95,00	0,00		75		-		-						-		0,00%		0,00			
			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%) ()	95,00	0,00		75		-		-						-		0,00%		0,00			
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%) ()	95,00	0,00		75		-		-						-		0,00%		0,00			
			Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%) ()	95,00	0,00		75		-		-						-		0,00%		0,00			

		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksana Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		10.981.174.406		3.980.110.947	100	2.025.835.165	-	407.355.000	-	463.342.821		-	-	-	870.697.821	0,00%	42,98%	0,00	4.850.808.768	0,00%	113,08%
		Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		2.948.855.846	5,00	2.002.248.609	5	246.088.240	-	-	2	11.328.941			2		11.328.941	40,00%	4,60%	7,00	2.013.577.550	0,00%	68,28%
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		-	50,00	141.618.605	60	1.136.647.425	20	338.730.000	20	305.012.000			40		643.742.000	66,67%	56,64%	90,00	785.360.605	0,00%	0,00%
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)		3.411.114.657			50	120.761.000	3	7.760.000	13	43.766.880			16		51.526.880	32,00%	42,67%	16,00	51.526.880	0,00%	1,51%
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)		4.621.03.903	59,00	1.836.243.733	51	522.338.500	6	60.865.000	13	103.235.000			19		164.100.000	37,25%	31,42%	78,00	2.000.343.733	0,00%	43,29%

		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota (Persen)		6.452.940.392		402.711.055	100	472.311.693	-	3.220.000	-	2.050.000		-	-	-	5.270.000	0,00%	1,12%	0,00	407.981.055	0,00%	49,44%
		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)		875.049.045			4	78.780.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)		1.813.130.047			2	150.490.693	-	3.220.000	-	-				-	3.220.000	0,00%	2,14%	0,00	3.220.000	0,00%	0,18%
		Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		686.880.202			4	22.740.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	*Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)		558.306.292			4	28.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		902.358.707	14,00	87.025.370	4	55.600.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	14,00	87.025.370	0,00%	9,64%
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)		907.444.212	23,00	167.598.616	12	95.573.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	23,00	167.598.616	0,00%	18,47%

		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		709.771.887	18,00	148.087.069	12	41.128.000	-	-	-	2.050.000				-	2.050.000	0,00%	4,98%	18,00	150.137.069	0,00%	21,15%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota (Persen)		1.025.284.355	-	-	100	95.929.392	-	6.444.885	-	5.000.000		-	-	-	11.444.885	0,00%	11,93%	0,00	11.444.885	0,00%	1,72%
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)		666.017.894			4	80.292.000	1	6.444.885	-	5.000.000				1	11.444.885	25,00%	14,25%	1,00	11.444.885	0,00%	1,72%
		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)		359.266.461			4	15.637.392	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								42,77%		34,21%				
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah		Sangat Rendah				
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Sumber Daya Manusia Damkar (Persen)	6000		0,00		40		-	-						-		0,00%		0,00			
			Sarana dan Prasarana Damkar (Persen)	6000	44.307.581.646	0,00	3.868.571.358	40	9.503.656.335	-	22.455.000	-	2.847.570.000		-	-	-	2.870.025.000	0,00%	30,20%	0,00	6.738.596.358		15,21%
			Sarana dan Prasarana di masyarakat yang tersedia (Persen)	6000		0,00		40		-	-						-		0,00%		0,00			
			Pemahaman melalui Edukasi dan Informasi (Persen)	6000		0,00		40		-	-						-		0,00%		0,00			

BAB III
RENCANA KERA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TABALONG

Dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025, ada beberapa kegiatan dan ada juga yang mengalami perubahan dari segi target dan anggaran, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator program awal adalah Nilai AKIP dengan target “BB”, indikator perubahan adalah Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target “BB” sedangkan kegiatannya meliputi :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari pagu awal 103.171.568,- pagu perubahan 103.171.568,-
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari pagu 12.480.673.303,- pagu perubahan 12.480.673.303,-
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari pagu 8.570.552,- pagu perubahan 8.570.552,-
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari pagu awal 658.131.240,- pagu perubahan 1.555.929.300,-
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu awal 4.623.743.928,- pagu perubahan 2.560.803.014,-
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu awal 4.011.528.931,- pagu perubahan 3.63.329.338,-
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu awal 2.479.591.466,- pagu perubahan 4.143.573.695,-
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator program awal adalah Persentase Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan) dengan target 100% dan Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Walikota dengan target 100% indikator perubahan adalah Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan dengan target 75%, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas dengan target 75%, Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat dengan target 75%, Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan target 75% sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu awal 2.138.304.665,- pagu perubahan 2.249.116.945,-
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota pagu awal 510.336.693,- pagu perubahan 391.203.292,-
 - c. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota pagu awal 144.226.392,- pagu perubahan 154.686.392,-
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, indikator program awal adalah Cakupan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dengan target 100% dan Teenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran dengan target 100%, indikator perubahan Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran dengan target 40% dan Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target 40% sedangkan kegiatannya meliputi :
- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pagu awal 9.541.917.335,- pagu perubahan 8.863.051.335,-

Tabel 3.1 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TABALONG	Nilai AKIP	BB	24.365.410.988	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TABALONG	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	24.116.050.770	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TABALONG	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	103.171.568	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TABALONG	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	103.171.568	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TABALONG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.304.819	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TABALONG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	24.304.819	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	TABALONG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.194.018	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	TABALONG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.194.018	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TABALONG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.989.214	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TABALONG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.989.214	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TABALONG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.684.680	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TABALONG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.684.680	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	TABALONG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.732.630	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	TABALONG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.732.630	

1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.960.178	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.960.178	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TABALONG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.804.484	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TABALONG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.804.484	
1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	17.615.740	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	17.615.740	
1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	TABALONG	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	25.885.805	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	TABALONG	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	25.885.805	kegiatan statistik dalam rangka pengumpulan data, sesuai arahan bidang statistik dan persandian diskominfo
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TABALONG	Persentase Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	12.480.673.303	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TABALONG	Persentase Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	40 Orang/ Bulan	12.480.673.303	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TABALONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	12.472.515.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TABALONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	12.472.515.000	
2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TABALONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	1.546.483	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TABALONG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan	1.546.483	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	6.611.820	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	6.611.820	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TABALONG	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	8.570.552	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TABALONG	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	8.570.552	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	TABALONG	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.153.728	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	TABALONG	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.153.728	

3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.416.824	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.416.824	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TABALONG	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	658.131.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TABALONG	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 Paket	1.555.929.300	
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TABALONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	494.358.240	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	TABALONG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	407.445.500	Pergeseran Anggaran Penyesuaian Pengadaan Pakaian Dinas sesuai arahan dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri RI untuk Menyesuaikan Pengadaan Pakaian Satpol PP sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2019 dan Permendagri No. 04 Tahun 2023 untuk Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TABALONG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	163.773.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	TABALONG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	1.148.483.800	Pergeseran Anggaran untuk menindaklanjuti catatan strategis LKPJ DPRD yang meminta agar SatpolPP meningkatkan kapasitas SDM dan Biaya Kontribusi Pelatihan Inspektur Pemadam Kebakaran dan Peningkatan Kapasitas Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TABALONG	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4.623.743.928	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TABALONG	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	2.560.803.014	
5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	3.259.571.733	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	1.440.186.257	
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	312.651.738	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TABALONG	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	256.118.826	Pergeseran Anggaran untuk Penambahan fasilitas penting pendukung ruangan rapat untuk mendukung koordinasi dan pembahasan antar unit kerja/Instansi atau stakeholder
5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TABALONG	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	110.201.057	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TABALONG	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	107.668.931	

5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	TABALONG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	112.710.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	TABALONG	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	105.210.000	
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141 Laporan	828.609.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TABALONG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141 Laporan	651.619.000	Pergeseran Anggaran Perjalanan Dinas untuk koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah untuk mendukung sinergitas dan kerjasama antar Instansi terkait dan mendukung koordinasi terkait inovasi peningkatan kinerja khususnya pada urusan pemerintahan bidang ketertamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TABALONG	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.011.528.931	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TABALONG	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136 Laporan	3.263.329.338	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	110.040.000	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	3.749.328.931	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TABALONG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	121 Laporan	3.153.289.338	Pergeseran Anggaran untuk Pemeliharaan Gedung dikarenakan usia bangunan gedung sudah cukup lama sehingga memerlukan pemeliharaan secara intensif dan untuk menghindari kerusakan yang signifikan serta mendukung efektifitas penggunaan sarana dan prasarana operasional serta meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TABALONG	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.479.591.466	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TABALONG	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.143.573.695	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TABALONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	939.070.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TABALONG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	590.570.000	

7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TABALONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 unit	55.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TABALONG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	46.360.000	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TABALONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.485.521.466	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TABALONG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.506.643.695	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TABALONG	Persentasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.792.867.750	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TABALONG	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	75%	2.795.006.629	
			Persentasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	75%		
								Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	75%		
								Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	75%		
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	100%	2.138.304.665	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG		100%	2.249.116.945	
1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	5 Dokumen	294.658.240	Penindakan atas Gangguan	TABALONG	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	51 Kasus	246.088.240	
1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	TABALONG	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60 Orang	1.161.298.425	Pemberdayaan yang Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	1.343.402.705	
1.3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	TABALONG	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Dokumen	120.761.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	TABALONG	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	137.482.000	

	Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					Bernuansa Hak Asasi Manusia					
1.4	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	51 laporan	522.144.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	160 Dokumen	522.144.000	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	510.336.693	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	391.203.292	
2.1	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	78.780.000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	49.310.000	
2.2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	TABALONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	2 unit	150.490.693	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	TABALONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	2 unit	128.135.692	Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2.3	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	22.470.000	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	19.330.000	
2.4	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	TABALONG	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 Laporan	28.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	TABALONG	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4 Laporan	25.970.000	
2.5	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	55.600.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	54.551.960	
2.6	Pengawasan Aatas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	133.598.000	Pengawasan Aatas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	73.241.640	

2.7	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	41.128.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	TABALONG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	40.664.000		
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	TABALONG	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	144.226.392	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	TABALONG	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	154.686.392		
3.1	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen	128.589.000	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	TABALONG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	4 Dokumen	144.149.000	Peningkatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	
3.2	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4 Laporan	15.637.392	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	TABALONG	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4 Laporan	10.537.392		
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	TABALONG	Cakupan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	100%	9.541.917.335	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	TABALONG	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	40%	8.863.051.335		
			Teenuhinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran	6 Unit				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	40%			
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Persentase Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	9.541.917.335	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Persentase Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	8.863.051.335		
1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan gan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	40 Dokumen	694.070.176	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TABALONG	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten,Kota Setiap Tahunnya	40 Dokumen	417.604.176	Pergeseran Anggaran untuk meningkatkan kinerja petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	
1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	TABALONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	8.847.847.159	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Ala Pelindung Diri	TABALONG	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 Unit	8.445.447.159	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasional Rescue untuk meningkatkan evakuasi non kebakaran dengan memenuhi kendaraan operasional dengan spesifikasi untuk penyelamatan dan evakuasi hewan buas dan meningkatkan keselamatan pekerja dan memenuhi standar peralatan minimal pemadam kebakaran	
JUMLAH					36.700.196.073						35.774.108.734	

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,

2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. Tazeriyanor, MA

Pembina (VI/3)

NIP. 19671104 198903 1 011